

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada SKPD Kabupaten Tegal)**

Sukarman¹, Grace Tianna Solovida²

¹Universitas Diponegoro

email: sukarmanse@gmail.com

²STIE Bank BPD Jateng

Email : dosen.idolaku@gmail.com

ABSTRACT

The preparation of quality local government financial reports will require human resources involved in the preparation of local government financial reports that have competence in the field of government accounting as well as adequate financial management and regional property. Conditions that occur at this time, the number of financial administration officials-regional work units as well as accounting officers in regional work units who have accounting competence is still very limited so they do not understand or master the preparation of local government financial reports adequately. The population studied is employees who carry out the financial and regional administration functions, namely financial administration officials-regional apparatus work units, accounting officers, expenditure treasurers, revenue treasurers, goods user administration officials, user goods management and user goods manager assistants in all units Tegal regional work unit (48 regional work unit), with a sample of 96 people. The data in this study were analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) method of the PLS software package. The software used is the SmartPLS software. The results of the study concluded that organizational commitment, human resource capacity, the use of information technology, the government's internal control system, and the effectiveness of internal auditors had a positive and significant effect on the quality of local government financial statements in the Tegal Regency government. Another result is the administration of regional property capable of being a moderating variable on the influence of organizational commitment to the quality of the financial statements of the local government in the Tegal Regency Government, the government's internal control system and the effectiveness of auditors on the quality of local government financial statements in the Tegal Regency government.

Keywords: organizational commitment, human resource capacity, utilization of information technology, government internal control systems, effectiveness of internal auditors, quality of local government financial reports, financial and regional property administration.

ABSTRAK

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas maka diperlukan SDM yang terlibat dalam penyusunan LKPD yang mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang memadai. Kondisi yang terjadi pada saat ini, jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) maupun petugas akuntansi pada SKPD yang memiliki kompetensi bidang akuntansi masih sangat terbatas sehingga kurang memahami atau menguasai penyusunan LKPD secara memadai. Populasi yang diteliti yaitu pegawai yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan dan BMD, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Petugas Akuntansi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di seluruh SKPD Kabupaten Tegal (48 SKPD), dengan sampel 96 orang. Data pada penelitian ini dianalisis memakai metode Structural Equation Modelling (SEM) dari paket software PLS. Software yang digunakan adalah software SmartPLS. Hasil penelitian menyimpulkan komitmen organisasi, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan efektivitas auditor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal. Hasil lainnya yaitu penatausahaan barang milik

daerah mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD pada Pemerintah Kabupaten Tegal, untuk hasil moderasi lainnya ternyata penatausahaan barang milik daerah tidak mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan efektivitas auditor terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.

Kata kunci: komitmen organisasi, kapasitas SDM, pemanfaatan TI, SPIP, efektivitas auditor internal, kualitas LKPD, penatausahaan BMD.

1. Pendahuluan

Penilaian kewajaran laporan keuangan berdasarkan kriteria umum seperti: efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), ketaatan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, dan kesesuaian dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Opini yang akan diberikan oleh BPK terhadap LKPD ditentukan oleh pemenuhan keempat kriteria tersebut. Opini WTP diberikan apabila LKPD dianggap bebas dari kesalahan penyajian informasi secara material dan secara keseluruhan laporan keuangan sudah disajikan secara wajar. Opini WDP diberikan apabila informasi yang disajikan pada LKPD terdapat salah saji secara material pada akun-akun tertentu, tetapi secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran LKPD.

Permasalahan yang menjadi kendala pada instansi pemerintah belum memperoleh opini WTP dari hasil audit BPK terhadap LKPD cukup beragam. Fenomena yang terjadi saat ini lebih sering disebabkan masalah penatausahaan aset tetap atau barang milik daerah (BMD) yang tidak memadai sehingga auditor tidak dapat menyakini kewajaran nilai aset tetap yang disajikan di neraca. Permasalahan penatausahaan BMD tersebut antara lain terdapat BMD yang belum dicatat, terdapat pencatatan BMD yang tidak ditemukan barangnya, dan terdapat pencatatan BMD yang tidak didukung bukti kepemilikan yang sah. Hal ini terjadi dikarenakan aset tetap/BMD yang jumlahnya terlalu banyak dan belum dilakukannya pencatatan BMD secara tertib sejak diperolehnya BMD tersebut. Selain itu, kelemahan dari aset

tetap juga muncul karena pemerintahan daerah kurang memperhatikan pentingnya pengelolaan BMD sehingga lebih mengutamakan pengelolaan keuangan dan menyerahkan permasalahan pengelolaan BMD kepada Pengurus Barang SKPD.

Agar LKPD bermanfaat untuk pengguna maka penyajian informasi pada LKPD harus andal. Aset tetap merupakan akun pada Neraca dengan nilai cukup material, untuk itu agar dihasilkan informasi yang andal dalam LKPD maka pengelolaan BMD harus dilakukan secara tertib, antara lain dengan penatausahaan BMD secara memadai. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal apabila tidak terdapat kesalahan material dan pengertian yang menyesatkan, disajikan secara jujur, dan dapat diverifikasi.

Berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnianto (2017) dengan judul Pengaruh Penatausahaan BMD Terhadap Kualitas LKPD pada Pemerintah Kabupaten Magelang, menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD berpengaruh signifikan pada kualitas LKPD.

Agar dihasilkan LKPD yang berkualitas maka diperlukan SDM yang terlibat dalam penyusunan LKPD yang mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan BMD yang memadai. Kondisi yang terjadi pada saat ini, jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) maupun petugas akuntansi pada SKPD yang memiliki kompetensi bidang akuntansi masih sangat terbatas sehingga kurang memahami atau menguasai penyusunan LKPD secara memadai.

Melihat fenomena penatausahaan aset tetap/BMD selalu menjadi temuan BPK sehingga dapat berpengaruh pada kualitas LKPD maka menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan menguji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD dengan penatausahaan BMD sebagai variabel *moderating*. Adapun yang diduga mempengaruhi kualitas LKPD adalah komitmen organisasi, kapasitas SDM, pemanfaatan TI, SPIP dan efektivitas auditor internal.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

LKPD merupakan gabungan/konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah). Entitas pelaporan menyusun LKPD berdasarkan laporan keuangan SKPD yang disusun oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan laporan keuangan SKPKD. Menurut Sari (2016), kualitas LKPD dipengaruhi oleh kapasitas SDM, pemahaman akuntansi, SPI, dan pemanfaatan TI. Menurut Fitriyah dan Rasuli (2017), kualitas LKPD dipengaruhi oleh komitmen organisasi, kompetensi, sistem akuntansi instansi. Hasil penelitian Fitriyah dan Rasuli (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi, kompetensi, sistem akuntansi instansi memiliki pengaruh secara langsung yang signifikan dan positif pada kualitas LKPD. Etika dapat memoderasi hubungan komitmen organisasi dan kompetensi dengan kualitas laporan keuangan.

Rachmawati (2009) mengartikan komitmen organisasi sebagai sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya.

Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekad dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingannya sendiri.

Menurut Zuliarti (2012), pengertian kapasitas SDM adalah sebagai berikut: Kapasitas SDM adalah kemampuan seseorang, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Menurut Sutabri (2014:3), teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

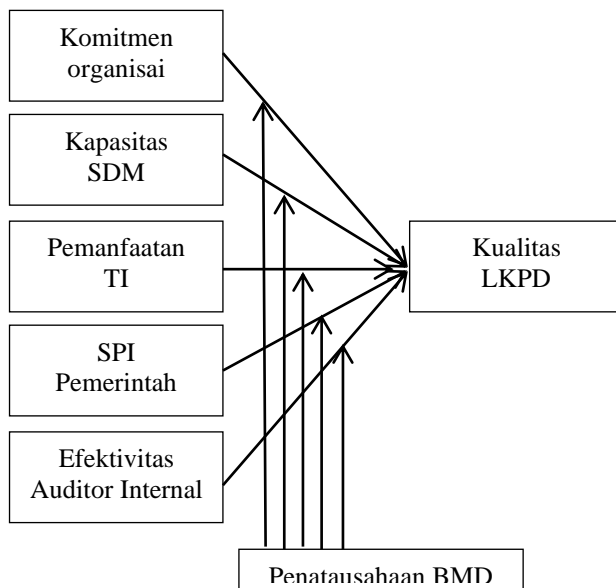
Pendekatan terkini dari sistem pengendalian intern (SPI) terkait dengan sektor pemerintahan di Indonesia adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah :“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Peran APIP yang efektif diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam kaitannya dengan penyusunan LKPD, APIP mempunyai tugas untuk melakukan reviu LKPD yang bertujuan untuk memberikan keyakinan keandalan informasi pada LKPD sebelum LKPD tersebut disampaikan kepala daerah kepada BPK. Reviu LKPD dilakukan dengan melakukan penelaahan penyajian LKPD dan penyelenggaraan akuntansi untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyajian LKPD sudah sesuai SAP dan akuntansi sudah diselenggarakan sesuai SAPD. Apabila dalam melakukan reviu, APIP menemukan terdapat kesalahan, kekurangan maupun penyimpangan dari SAP dan peraturan lainnya, APIP memberitahukan kondisi tersebut kepada entitas yang direviu. Dengan adanya reviu dari Inspektorat diharapkan akan dihasilkan LKPD yang berkualitas.

3. Model Penelitian

Model penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Model Penelitian

4. Metode Penelitian

Populasi yang diteliti yaitu pegawai yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan dan BMD, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Petugas Akuntansi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di seluruh SKPD Kabupaten Tegal (48 SKPD), dengan sampel 96 orang.

Untuk mengukur komitmen organisasi pada penelitian ini menggunakan indikator sebagai berikut : (1) Komitmen afektif (2) Komitmen berkelanjutan (3) Komitmen normatif. Indikator yang dipakai dalam mengukur kapasitas SDM pada penelitian ini mengadopsi dari penelitian Triyanto (2017) antara lain : (1) Latar belakang pendidikan (2) Pelatihan (3) Pengalaman (4) Tanggungjawab. Pemanfaatan Teknologi Informasi bisa dinilai dengan penggunaan komponen berikut: (1) Perangkat Keras Komputer (*Hardware*) (2) Perangkat Lunak Komputer (*Software*) (3) Jaringan dan Komunikasi. Indikator yang dipakai dalam mengukur SPIP yaitu menurut PP Nomor 60 tahun 2008 diantaranya : (1) Lingkungan pengendalian (2) Penilaian resiko (3) Kegiatan pengendalian (4) Informasi dan komunikasi (5) Pemantauan. Indikator efektivitas auditor internal yang dipakai pada penelitian ini mengadopsi dari penelitian Haryati (2015) yaitu kualifikasi auditor internal, pelaksanaan audit internal, laporan hasil audit internal dan tindak lanjut hasil audit internal. Indikator yang dipakai dalam mengukur penatausahaan BMD dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Milanda (2018) yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD. Indikator kualitas LKPD berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Data pada penelitian ini dianalisis memakai metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dari paket *software PLS-Software* yang digunakan adalah *software SmartPLS*.

5. Hasil dan Pembahasan

a. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal

Hasil penelitian membuktikan komitmen organisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan semakin tinggi komitmen organisasi, semakin tinggi kualitas LKPD. Hasil penelitian ini mampu mendukung kajian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Fitriisyah dan Rasuli (2017) serta Agung dan Gayatri (2018) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan dan positif pada kualitas laporan keuangan. Pegawai yang mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasinya akan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya komitmen pegawai yang rendah cenderung mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja. Pada posisi inilah pentingnya komitmen pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Pengaruh kapasitas SDM terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal

Kajian penelitian ini membuktikan kapasitas SDM memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan semakin baik kapasitas SDM, semakin tinggi kualitas LKPD. Hasil penelitian tersebut memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sari (2016), Artika (2016) dan Andrianto (2017) menyimpulkan bahwa Kapasitas SDM berpengaruh

signifikan dan positif pada kualitas laporan keuangan. Agar dihasilkan LKPD yang berkualitas diperlukan kapasitas SDM yang memadai, karena apabila kapasitas SDM yang menyusun LKPD memadai maka dimungkinkan LKPD yang dihasilkan berkualitas. Jika kapasitas SDM dari instansi yang menyusun LKPD kurang/tidak memadai maka LKPD yang dihasilkan kurang/tidak berkualitas. Oleh sebab itu, kapasitas SDM yang memadai akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Output yang diharapkan akan terealisasi dengan baik ketika proses kerja didukung dengan kapasitas yang memadai pula.

c. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan TI memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan semakin tinggi pemanfaatan TI, semakin tinggi kualitas LKPD. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2016), Artika (2016), Andrianto (2017), Baturante dkk (2017), Armel (2017), menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif pada kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan terhadap teknologi informasi yang diterapkan, maka akan dihasilkan kualitas LKPD yang semakin baik sehingga dapat dikatakan pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh positif pada kualitas LKPD. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung proses kerja ke arah yang lebih baik, terutama tingkat efektivitas dan efisiensi.

d. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal

Hasil penelitian membuktikan SPIP memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan semakin baik SPIP, semakin tinggi kualitas LKPD. Sistem pengendalian internal dapat diukur melalui beberapa unsur, diantaranya adalah unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pengendalian intern diterapkan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan khususnya dalam menyusun LKPD agar dihasilkan LKPD yang berkualitas. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faishol (2016), Kiranayanti dan Erawati (2016), Sari (2016), menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif pada kualitas laporan keuangan.

e. Pengaruh efektivitas auditor internal terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal

Penelitian secara statistik membuktikan bahwa efektivitas auditor internal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan semakin baik efektivitas auditor internal, semakin tinggi kualitas LKPD. Hasil ini tentu saja menjadi alat pembuktian ataupun memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Sari (2014), Lasmara dan Rahayu (2016), menyimpulkan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan dan positif pada kualitas laporan keuangan. Dengan demikian adanya peran auditor internal yang efektif akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam LKPD.

f. Pengaruh penatausahaan BMD mampu memoderasi hubungan antara komitmen organisasi, kapasitas SDM, pemanfaatan TI, SPIP dan efektivitas auditor internal

terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal

Hasil penelitian menyimpulkan penatausahaan BMD memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD. Sementara itu untuk penatausahaan BMD tidak memoderasi pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI, SPIP dan efektivitas auditor internal terhadap kualitas LKPD. Penatausahaan BMD yang baik harus didukung dengan adanya komitmen organisasi, kapasitas SDM yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi, peran auditor internal yang efektif serta SPI yang memadai dalam menghasilkan laporan BMD. Dengan demikian adanya komitmen organisasi, kapasitas SDM yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi, peran auditor internal yang efektif, sistem pengendalian intern yang memadai serta diperkuat dengan penatausahaan BMD yang memadai maka akan menghasilkan keluaran berupa informasi LKPD yang berkualitas untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang. Namun dalam penelitian ini, penatausahaan BMD belum seluruhnya mampu menjadi variabel moderasi.

6. Kesimpulan

- a. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
- b. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
- d. SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.

- e. Efektivitas auditor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
- f. Penatausahaan barang milik daerah mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
- g. Penatausahaan barang milik daerah tidak mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
- h. Penatausahaan barang milik daerah tidak mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
- i. Penatausahaan barang milik daerah tidak mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh SPIP terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
- j. Penatausahaan barang milik daerah tidak mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh efektivitas auditor terhadap kualitas laporan keuangan LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Tut Madiguna & Gayatri., (2018) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 23.2. Mei (2018); 1253-1276
- Andrianto, Elvin., (2017) “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)”. Jurnal Fakultas Ekonomi UNY.
- Armel, Raja Yoga Gustika., (2017) “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)”. *JOM Fekom*. Vol. 1 (Februari), hal. 105-119.
- Artika, Yuli., (2016) “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu”. *JOM Fekon*. Vol. 3 No. 1 (Februari), hal.219-233.
- Faishol, Ahmad., (2016) “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)”. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. Vol. 1 No. 3 (Oktober), hal. 205-212.
- Fitrisyah, Aidil dan M. Rasuli, (2017) “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Etika Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)”, *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, Vol. IX No. 3, September 2017, hal. 1-16
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Haryati, Tri. (2015) “Pengaruh Komitmen Manajemen, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Auditor Internal, Kualitas Sistem Akuntansi dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang), Magister Akuntansi Universitas Diponegoro”. Tesis (tidak dipublikasikan).
- Kiranayanti, Ida Ayu Enny dan Ni Made Adi Erawati., (2016) “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. E-Jurnal AKuntansi Universitas Udayana. Vo. 16.2 (Agustus), hal. 1290-1318.
- Lasmara, Freddie dan Sri Rahayu., (2016) “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci“. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vo. 3 No. 4 (April-Juni), hal. 231-242.
- Rachmawati. S. R (2009) “Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi kerja, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Bidang Keuangan Pada Pemda Kabupaten Sukoharjo.” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/5394/1/B200050371.PDF>
- Sari, Nilam., (2016) “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo”. *JOM Fekom*. Vol. 3 No. 1 (Februari), hal. 1478-1490
- Solihin, Mahfud., Dwi Ratmono. 2013. “*Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*”. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Sutabri, Tata. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah :Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.